

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-undang No. 13 Tahun 2003: Tentang Ketenagakerjaan). Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber daya alam, modal dan teknologi. Apabila ditinjau secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000 Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas adalah tenaga kerja, namun sejak sensus penduduk tahun 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

Dalam hal ketenagakerjaan WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk kedalam kategori bukan angkatan kerja dikarenakan WBP tersebut sudah dalam penduduk usia kerja namun karena sedang menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dan dilakukan pembinaan secara terbatas, tetapi setelah mereka selesai menjalani masa pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan mereka akan kembali masuk kedalam kategori angkatan kerja, oleh karena itu didalam Lembaga Pemasyarakatan WBP dilakukan pembinaan keterampilan dan keahlian supaya setelah mereka selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat membuka usaha sendiri atau menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah sangat pelik, hal ini tampak dari jumlah pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada tahun 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Mereka terbagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, hingga pengangguran temporer atau insidental (Septa, 2010). Menurut Muhaimin Iskandar, kemampuan sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja sangat terbatas yaitu hanya 37 persen dari seluruh orang yang bekerja. Sementara sektor informal menyerap 63 persen (Anonim, 2010).

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran adalah rendahnya kewirausahaan (Entrepreneurship) sehingga sumber daya yang ada fokus pada kegiatan mencari kerja bukan menciptakan lapangan kerja (Septa,2010).

Perkembangan kewirausahaan di suatu negara mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Suatu pernyataan yang bersumber dari PBB menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya (Alma, 2005).

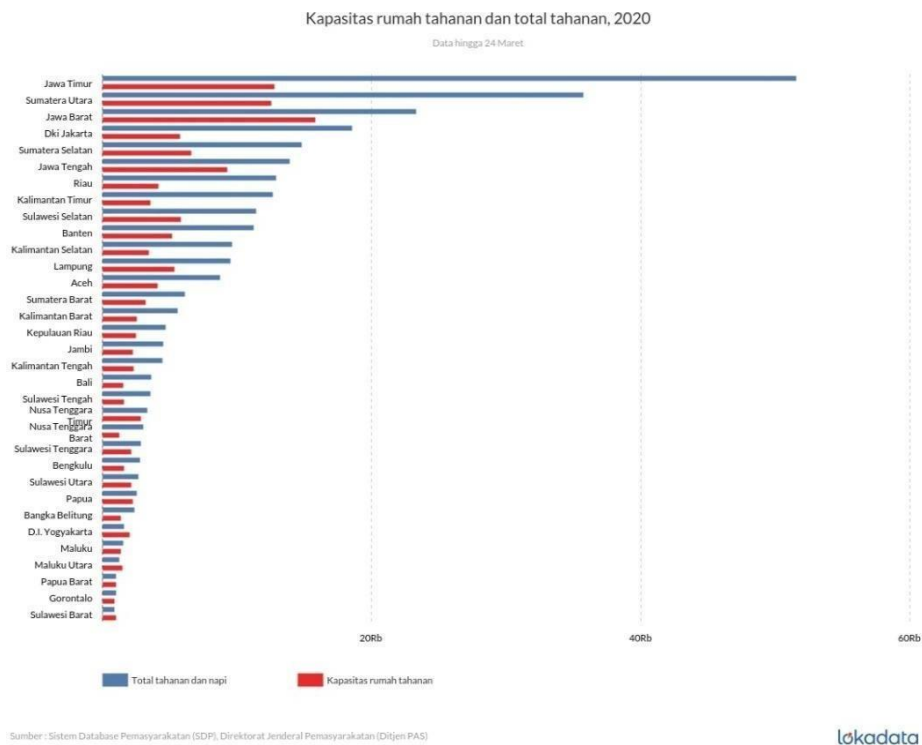
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, jumlah wirausaha di Indonesia hanya sekitar 0,24 persen dari jumlah penduduk di Indonesia yang sekitar 238 juta jiwa. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wirausaha di beberapa negara luar yang tingkat pertumbuhannya tinggi. Jumlah wirausaha di Amerika Serikat yang merupakan negara maju di dunia, mencapai sekitar 11 persen. Jumlah wirausaha di Singapura juga tinggi, mencapai 7 persen, dan di Malaysia mencapai 5 persen (Djumena, 2011).

Untuk mendukung berkembangnya kewirausahaan di Indonesia, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden No. 4 Th 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus dikembangkan sedemikian rupa melalui berbagai Departemen Teknis maupun Institusi-institusi lain yang ada di masyarakat. Melalui gerakan ini pada saatnya budaya kewirausahaan

diharapkan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh dan mandiri.

Pelatihan kewirausahaan selain dilakukan dimasyarakat umum juga perlu dilakukan bagi WBP mengingat mereka juga perlu diberikan keahlian dan kemampuan dalam berwirausaha untuk bekal mereka kedepannya setelah terbebas dari masa pidananya, penanaman sifat wirausaha dapat dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada WBP, dikarenakan jumlah WBP sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) untuk berwirausaha sangat banyak di Indonesia yaitu sebanyak 293.583 orang berdasarkan data Maret 2020.

Bedasarkan pengertian diatas maka WBP termasuk Tenaga Kerja namun dalam hal ini Bukan Angkatan Kerja dikarenakan WBP dibatasi sebagian besar hak kebebasannya selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan



Gambar 1.1. Kapasitas Rumah Tahanan dan Total Tahanan 2020
Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan [SDP] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [DitjenPas]

Dalam penanaman sifat entrepreneurship di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung memiliki potensi yang cukup besar dikarenakan memiliki jumlah WBP sebanyak 404 orang berdasarkan data Juni 2021.

Jumlah Penghuni Khusus	No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
			DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Anak																				
Perawatan	1	01 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	2	2	402	402	325	124	24	
Bapas	3	03 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	399	399	0	2	2	401	401	325	123	23		
Rujukan	4	04 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	399	399	0	2	2	401	401	325	123	23		
Sumber Daya Manusia	5	05 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	401	401	0	2	2	403	403	325	124	24		
Binkemas Bapas	6	06 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	401	401	0	2	2	403	403	325	124	24		
	7	07 Jun 2021	0	0	0	0	0	0	401	401	0	2	2	403	403	325	124	24		

Gambar 1.1. Data Tabel Jumlah Total Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung
 Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan [SDP] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [DitjenPas]

Dari data tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa di dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung memiliki SDM yang banyak, oleh karena itu WBP dilatih untuk menjadi entrepreneur melalui kegiatan pelatihan edukasi entrepreneurship salah satunya dibidang tata boga.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pihak Lapas tersebut maka diharapkan WBP tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain ketika mereka bebas, sehingga tidak menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Dalam pelatihan yang diberikan oleh pihak Lapas WBP yang melakukan pelatihan kewirausahaan bidang tata boga akan diberikan sarana untuk mengaplikasikan wirausahanya ditempat asimilasi yang bernama SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, didalam Sarana Asimilasi dan Edukasi ini warga binaan pemasyarakatan menjual produk hasil pelatihannya kepada masyarakat umum dan dalam penjualan produk tersebut dibuatkan laporan pemasukan dan pengeluaran. Dari laporan pemasukan dan pengeluaran tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai biaya maupun manfaat dari pelatihan kewirausahaan bidang tata boga yang dilakukan pihak Lapas untuk menemukan peluang-peluang usaha apa saja yang memiliki potensi besar diluar agar dapat selalu melakukan inovasi-inovasi dalam pelatihan kewirausahaan.

Bedasarkan data diatas dari pelatihan dan edukasi yang diberikan dari pihak Lapas kepada WBP menimbulkan minat serta ketertarikan yang berbeda-beda untuk menjadi entrepreneurship dan pada program pelatihan edukasi entrepreneurship yang dilakukan oleh pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung juga ingin mengetahui berapakah besar biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari pelatihan dibidang tata boga oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS BIAYA MANFAAT EDUKASI ENTREPRENEURSHIP DALAM PROSES ASIMILASI WBP DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG”**

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja manfaat ekonomi dari pelatihan edukasi asimilasi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.
2. Apa saja biaya ekonomi yang diperlukan dalam pelaksanaan edukasi entrepreneur di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.
3. Bagaimana perbandingan manfaat dan biaya dari edukasi entrepreneur terhadap WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dalam jangka panjang.

1.3. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar minat WBP dalam melakukan kegiatan pembinaan entrepreneurship dan minat WBP untuk menjadi entrepreneur di kemudian hari.
2. Untuk menganalisis biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari pelatihan edukasi entrepreneurship dibidang tata boga dalam proses asimilasi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan gambaran yang mungkin akan berguna dalam melanjutkan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis/ Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan bagi penulis.
3. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam memperhatikan sektor entrepreneurship di Lembaga Masyarakatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Entrepreneurship

Dalam buku karya Schumpeter pada tahun 1934 dengan judul *The Theory Of Economics Development* dan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle* Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunannya adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan system yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami stagnasi. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para pengusaha. Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber

peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama.

Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Inovasi di sini bukan hanya berarti perubahan yang besar dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukuan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya. Peran pengusaha sangat vital dalam mewujudkan produk yang inovatif. Karena pada hakekatnya mesin, alat kerja dan semua benda tidak akan berfungsi secara maksimal bila tidak ada yang menggunakannya atau mengoperasikannya. Manusia yang memungkinkan inovasi dapat terjadi dengan segala macam bentuknya. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah lingkungan masyarakat yang menganut paham *laissez-faire*, bukan dalam

masyarakat sosialis ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya. Dalam masyarakat yang menganut mekanisme pasar, besarnya insentif yang akan diterima seseorang karena adanya penemuan- penemuan baru lebih besar dibandingkan dengan insentif yang diterima oleh masyarakat sosialis.

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang adanya kreativitas para pengusaha. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan mampu melahirkan beberapa pengusaha perintis yang mencoba menerapkan ide-ide baru mereka dalam kehidupan ekonomi. Mungkin tidak semua pengusaha perintis tersebut akan menuai sukses dalam inovasinya. Bagi pengusaha perintis yang menuai sukses dalam inovasinya tersebut, dia akan memperoleh keuntungan monopoli atas buah kreativitasnya, karena di mata konsumen belum ada pengusaha lain yang melakukan terobosan seperti yang dia lakukan. Namun perlu diingat bahwa posisi monopoli tersebut tidak akan bertahan lama, karena hal yang senantiasa menyertai inovasi adalah adanya imitasi. Seorang innovator akan terus-menerus berada di atas apabila dia selalu melakukan improvisasi atas inovasi-inovasinya terdahulu. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima oleh para pengusaha yang tidak melakukan inovasi. Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para inovator dan sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator.

Sehingga, hasrat untuk berinovasi seringkali terdorong oleh adanya harapan memperoleh keuntungan tersebut.

Menurut Schumpeter, inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu (1) diperkenalkannya teknologi baru, (2) menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal, dan (3) inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Proses peniruan tersebut pada akhirnya akan diikuti oleh investasi oleh para peniru tersebut. Proses peniruan ini akan berpengaruh pada dua hal yaitu (1) menurunnya keuntungan monopolistis yang dinikmati oleh para inovator, dan (2) adanya penyebaran teknologi baru (*technological dissemination*) di dalam masyarakat sehingga teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya.

Dalam bahasa Indonesia, istilah *Entrepreneurship* diartikan kewirausahaan yang memiliki pengertian sedikit berbeda oleh para ahli. Meskipun demikian, masing-masing pendapat memiliki inti dari *entrepreneurship*, yaitu tentang kreativitas atau inovasi. Secara umum Pengertian *Entrepreneurship* (Kewirausahaan) adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan.

Istilah Entrepreneurship diadopsi dari Bahasa Perancis, *entreprendre* yang berarti melakukan (*to undertake*), memulai atau berusaha melakukan tindakan mengorganisir dan mengatur. Istilah Entrepreneurship mulai diperkenalkan dalam tulisan Richard Cantillon yang berjudul *Essai Sur la Nature du Commerce en General* tahun 1755. (Hannah Orwa Bula, “*Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective*”, *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 1, No.11, Lahore, 2012).

Pengertian Entrepreneurship Menurut Para Ahli

Dalam literatur-literatur kewirausahaan diartikan berbeda-beda oleh para ahli. Berikut beberapa pengertian entrepreneurship (kewirausahaan).

- Menurut Suryana dalam *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses* (2013), entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau merekonstruksi ide-ide lama. Sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produksi baru atau pengenalan akan suatu produk baru.

- Danang Sunyoto dalam *Kewirausahaan Untuk Kesehatan* (2013) memiliki pandangan tentang entrepreneurship yaitu suatu sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Entrepreneurship tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, namun juga harus mempunyai nilai sosial.
- Hermawan Kartajaya menjelaskan pengertian Entrepreneurship adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengamatan atas suatu kesempatan bisnis, dengan melakukan manajemen terhadap risiko yang mungkin timbul serta keterampilan untuk berkomunikasi serta memobilisasi sumber daya yang adaterutama sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan.
- Abu Marlo pada buku *Entrepreneurship Hukum Langit* (2013) menjelaskan bahwa entrepreneurship adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan perubahan dari sistem yang ada. Dalam dunia entrepreneurship, peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan tetap memperhitungkan resiko yang dihadapi.
- Robbin & Coulter menjelaskan Kewirausahaan yakni suatu proses dimana seseorang atau suatu kelompok individu menggunakan upaya yang terorganisir & sarana untuk mencari

sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan, tidak mepedulikan apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini.

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diperoleh secara rinci unsur-unsur utama yang ada dalam entrepreneurship, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain.

Perbedaan Entrepreneurship dan Entrepreneur

Perbedaan antara Entrepreneurship dengan Entrepreneur adalah pada proses dan pelakunya. Jika entrepreneurship merujuk pada proses atau kegiatan, maka entrepreneur lebih merujuk pada pelaku. Dengan kata lain, orang yang melakukan proses entrepreneurship disebut entrepreneur. Pada masa dulu, istilah entrepreneur merupakan sebutan bagi para pedagang yang membeli barang di daerah-daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti.

Menurut Kasmir dalam Kewirausahaan (2013), entrepreneurship merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sedangkan seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah

ada sebelumnya, atau bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang ada.

Louis Jacques Filion dalam buku *De l'intuition au projet d'entreprise* menggambarkan entrepreneur sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaran-sasaran itu. Ia juga memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluang-peluang dan membuat keputusan.

Joseph Schumpeter seorang ahli ekonomi dari Austria mendefinisikan entrepreneur adalah seorang yang ingin dan mampu untuk melakukan perombakan sistem ekonomi, mengubah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi yang sukses. Inovasi baru tersebut dapat berwujud:

1. Produk baru (berupa barang atau jasa);
2. Organisasi atau manajemen baru;
3. Cara berproduksi yang baru;
4. Menggunakan bahan baku yang baru.

2.1.2 Konsep Ketenagakerjaan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (*manpower*) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam perminggu.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum.
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*)

dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana mereka mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*). Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia

tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi.

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua golongan yaitu :

1. Golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh.
2. Golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan.

Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (Wanita bukan karier), serta menerima

pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, penderita disabilitas yang mendapat sumbangan). WBP didalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk kedalam golongan bukan angkatan kerja dikarenakan WBP termasuk dalam usia kerja namun sedang tidak mencari pekerjaan dan kegiatan pembinaan selalu dibatasi. Kedua golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labor force*. Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja.

2.1.3 Ekonomi Kreatif

Istilah “Ekonomi Kreatif” mulai dikenal secara global sejak munculnya buku “*The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*” (2001) oleh John Howkins. Industri kreatif adalah industri yang mempunyai ciri-ciri keunggulan pada sisi kreatifitas dalam menghasilkan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan (Howkins, 2001).

Setiap negara mendefinisikan industri kreatif dengan sudut pandang yang berbeda begitupun dengan klasifikasinya, berikut definisi industri kreatif di berbagai negara dan klasifikasinya :

Tabel 2.1 Definisi Industri Kreatif Berbagai Negara

Negara	Definisi Industri Kreatif
United Kingdom	<p>Industri kreatif berasal dari kreativitas, keterampilan dan bakat dari suatu individu yang secara potensial mampu untuk menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi serta pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu.</p>

Negara	Definisi Industri Kreatif
Indonesia	<p>Ekonomi kreatif (ekraf) adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.</p>
Malaysia	<p>Dalam perspektif Malaysia industri kreatif adalah proses produksi bakat dan kemampuan individu atau kelompok berdasarkan kreativitas, inovasi dan teknologi yang mengarah ke sumber kesuksesan ekonomi dan pendapatan tinggi ke negara itu dengan penekanan pada aspek kerja intelektual dan kekayaan intelektual sejalan dengan budaya dan nilai-nilai murni keanekaragaman ras di Malaysia.</p>
Vietnam	<p>Interaksi antara kreativitas manusia, ide – ide, dan kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomiberbasis pengetahuan.</p>

Singapore, Thailand, Philippines	Industri kreatif berasal dari kreativitas, keterampilan dan bakat dari suatu individu yang secara potensial mampu untuk menciptakan kekayaan dan lapangan pekerjaan melalui eksploitasi serta pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu.
--	--

Sumber : *Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) United Kingdom, BEKRAF, Creative Industries Working Group (CIWG) Singapore, FiscalPolicy Research Institute (FPRI) Thailand, dan ARANGKADA Philippines, british council.*

Tabel 2.2 Sub-sektor Industri Kreatif Berbagai Negara

Negara	Sub-Sektor Industri Kreatif
United Kingdom	Periklanan, arsitektur, pasar seni, kerajinan, desain, perancang busana, film & video, perangkat lunak rekreasi interaktif, musik, seni drama, penerbitan, perangkat lunak & layanan, komputer, televisi

	& radio.
Singapore	<p>1. Seni dan budaya</p> <p>Seni pertunjukan, seni visual, seni sastra, fotografi, kerajinan, perpustakaan, museum, galeri, arsip, lelang, impresarios, situs warisan, situs seni pertunjukan, festival dan pendukung seni perusahaan;</p> <p>2. Desain</p> <p>periklanan, arsitektur, web dan perangkat lunak, grafik, produk industri, mode, komunikasi, interior dan lingkungan; dan</p> <p>3. Media</p> <p>Siaran (termasuk radio, televisi dan kabel), media digital (termasuk layanan perangkat lunak dan</p>

Negara	Sub-Sektor Industri Kreatif
	komputer), film dan video, dan rekaman musik dan penerbitan.
Thailand	Perlengkapan dan furnitur kayu, percetakan dan penerbitan, obat – obatan, perhiasan, penelitian, produksi gambar bergerak, bioskop, Radio, TV, dan layanan terkait teknologi informasi.
Malaysia	<p>1. Industri kreatif Multimedia :</p> <p>Film dan TV, iklan, seni desain, animasi dan konten digital.</p> <p>. Industri kreatif seni budaya : Kerajinan, seni visual, seni musik, seni pertunjukan, penulisan kreatif, fashion dan tekstil.</p> <p>. Industri kreatif warisan budaya : Industri warisan budaya adalah industri yang terkait dengan warisan budaya seperti kegiatan museum, arsip, restorasi dan konservasi.</p>

Indonesia	Arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan game developer, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa.
Philippines	Periklanan (media cetak dan media massa), pencetakan dan sastra, musik dan seni pertunjukan, seni visual, kerajinan, desain dan arsitektur, media audiovisual dan berita, warisan budaya, dan kegiatan budaya
Vietnam	periklanan, arsitektur, perangkat lunak dan hiburan, kerajinan tangan, desain, bioskop, penerbitan, mode, seni pertunjukan, pameran seni rupa dan fotografi, televisi dan radio, dan wisata budaya.

Sumber : *Department for Digital, Culture, Media and Sport(DCMS) United Kingdom, BEKRAF, Creative Industries Working Group (CIWG) Singapore, Fiscal Policy Research Institute (FPRI) Thailand, dan ARANGKADA Philippines, british council.*

2.1.4 Cost and Benefit Analysis

Dalam bahasa Indonesia, cost benefit analysis adalah analisis biaya manfaat. Sedangkan definisi cost benefit analysis adalah suatu proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam suatu kegiatan bisnis.

Cost benefit analysis merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunaannya untuk memilih atau memutuskan opsi tindakan mana yang perlu diambil untuk suatu resiko. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana perusahaan menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan performa perusahaan.

Berikut beberapa langkah dalam menerapkan cost benefit analysis untuk sebuah perusahaan atau organisasi :

1. Membuat Kerangka Analisa dari Cost Benefit Analysis

Langkah pertama adalah membuat kerangka analisis. Bentuk kerangka ini berbeda-beda, tergantung pada spesifikasi sebuah perusahaan. Lakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai, misalnya dengan bertanya apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Sasaran yang dibuat sangat penting dalam menginterpretasikan hasil analisis.

Lalu, putuskan metrik seperti apa yang akan digunakan untuk melakukan analisis, Kemudian, Anda harus menentukan nilai dari biaya dan manfaat yang Anda miliki dengan mata uang. Tujuannya agar Anda akan bisa memutuskan mana yang lebih tinggi antara biaya yang harus dikeluarkan atau manfaat yang akan didapatkan.

2. Mengidentifikasi Biaya dan Manfaatnya

Langkah kedua yaitu mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan dan manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan membuat daftar biaya dan daftar manfaat.

Adapun, biaya-biaya yang biasanya dihitung dalam cost benefit analysis formula yaitu:

- Biaya langsung (*direct cost*), meliputi biaya bahan baku, biaya manufaktur, biaya premi pekerja, biaya inventaris dan biaya pembelian bahan baku.
- Biaya tidak langsung (*indirect cost*), meliputi biaya listrik, biaya air, dan biaya lain yang menunjang operasional perusahaan.
- Biaya tidak teraba (*intangibile cost*), merupakan biaya yang cukup sulit ditentukan. Contohnya adalah menurunnya kepuasan pelanggan setelah penerapan

program layanan baru yang berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelanggan.

- Biaya peluang (*opportunity cost*), yaitu jumlah keuntungan yang didapatkan dari satu strategi bisnis dibandingkan dengan strategi lainnya.

Sedangkan manfaat yang harus dihitung dalam cost benefit analysis formula meliputi :

- Manfaat langsung (*direct benefit*), merupakan peningkatan pendapatan atau penjualan dari produk baru yang diproduksi.
- Manfaat tidak langsung (*indirect benefit*), yaitu peningkatan minat konsumen pada suatu brand.
- Manfaat tidak teraba (*intangibile benefit*), misalnya moral karyawan yang semakin membaik karena meningkatnya keuntungan perusahaan.
- Manfaat kompetitif (*competitive benefit*), merupakan manfaat yang mempengaruhi daya saing. Misalnya, masuk sebagai 3 perusahaan terbesar dalam industri yang dijalankan.

3. Mengukur Biaya dan Manfaat

Biaya dan manfaat yang muncul, tentunya akan lebih mudah jika dihitung dalam bentuk mata uang. Anda terlebih dahulu harus menentukan mata uang yang digunakan, secara

umum rupiah (Rp) adalah mata uang yang sering dipakai. Semua biaya dan manfaat harus dihitung, tanpa terkecuali. Dibawah ini merupakan rumus dari perhitungan *Cost and Benefit Analysis*.

$$NPV = \frac{(-K + B_1)}{(1 + r)} + \frac{B_2}{(1 + r_1)(1 + r_2)}$$

Dimana:

K = Capital Cost (Biaya Modal/Biaya Invetasi)

B_1 = Benefit Tahun 1

B_2 = Benefit Tahun 2

r_1 = suku bunga investasi tahun 1

r_2 = suku bunga investasi tahun 2

$$IRR = \sum_{t=0}^T \frac{B_t - C_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

Dimana:

$\sum_{t=0}^T$ = Pembiayaan Awal

B_t = Manfaat tahun t

C_t = Biaya tahun t

IRR = Nilai IRR

$$BCR = \frac{\sum B_t / (1 + i)^t}{\sum C_t / (1 + i)^t}$$

Dimana:

BCR = Benefit Cost Ratio

$\sum B_t$ = Jumlah Benefit/Manfaat

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini maka selain dari kajian teori yang telah dijelaskan di atas, dilakukan juga review terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini terutama didasarkan atas kesamaan objek penelitian yakni sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tujuan	Hasil
1	Asti, Dominicus Savio Priyarsono, Sahara. Analisis Biaya Manfaat Program Pembangunan Food Estate dalam Perencanaan Prespektif Perencanaan Wilayah : Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat.	Menganalisa Kelayakan Ekonomi Program Pembangunan Food Estate di Kalimantan Barat.	Investasi Food Estate menurut kriteria NPV, BCR, IRR dan Pay Back Period menunjukkan proyek layak secara ekonomi, dan mampu meningkatkan kesempatan

			kerja bagi masyarakat lokal.
2	Adhistya Cinta Dhama Istari Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Proyek Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Purwosari, Kediri)	Mengidentifikasi Kelayakan Proyek Pembangunan Melalui PNPM MP yaitu Proyek Pembangunan Irigasi Tersier.	Proyek Pembangunan Melalui PNPM menunjukkan proyek layak secara ekonomi dan meningkatkan pengembangan ekonomi lokal.
3	Rita Remeikiene,	Explaining	Niat

	Kaunas University of Technology, Lithuania.	Entrepreneurial Intention of University Students : The Role of Entrepreneurial Education	kewirausahaan dipengaruhi oleh factor kompleks, tetapi ciri ciri kepribadian utama seperti self-efficacy, pengambilan resiko, inisiatif untuk memulai bisnis, sikap yang menguntungkan terhadap bisnis, kontrol perilaku dan kebutuhan untuk berprestasi dapat dikembangkan melalui Pendidikan.
--	---	--	---

Sumber : Google Search Engine

2.3. Kerangka Pemikiran

Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang.

Secara umum banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli, mengenai kewirausahaan, dibawah ini merupakan beberapa pendapat tersebut yang diambil dari berbagai sumber : Harvey Leibenstein (1968, 1979), mengemukakan, kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Penrose (1963) : Kegiatan kewirausahaan mencakup indentifikasi peluang-peluang di dalam sistem

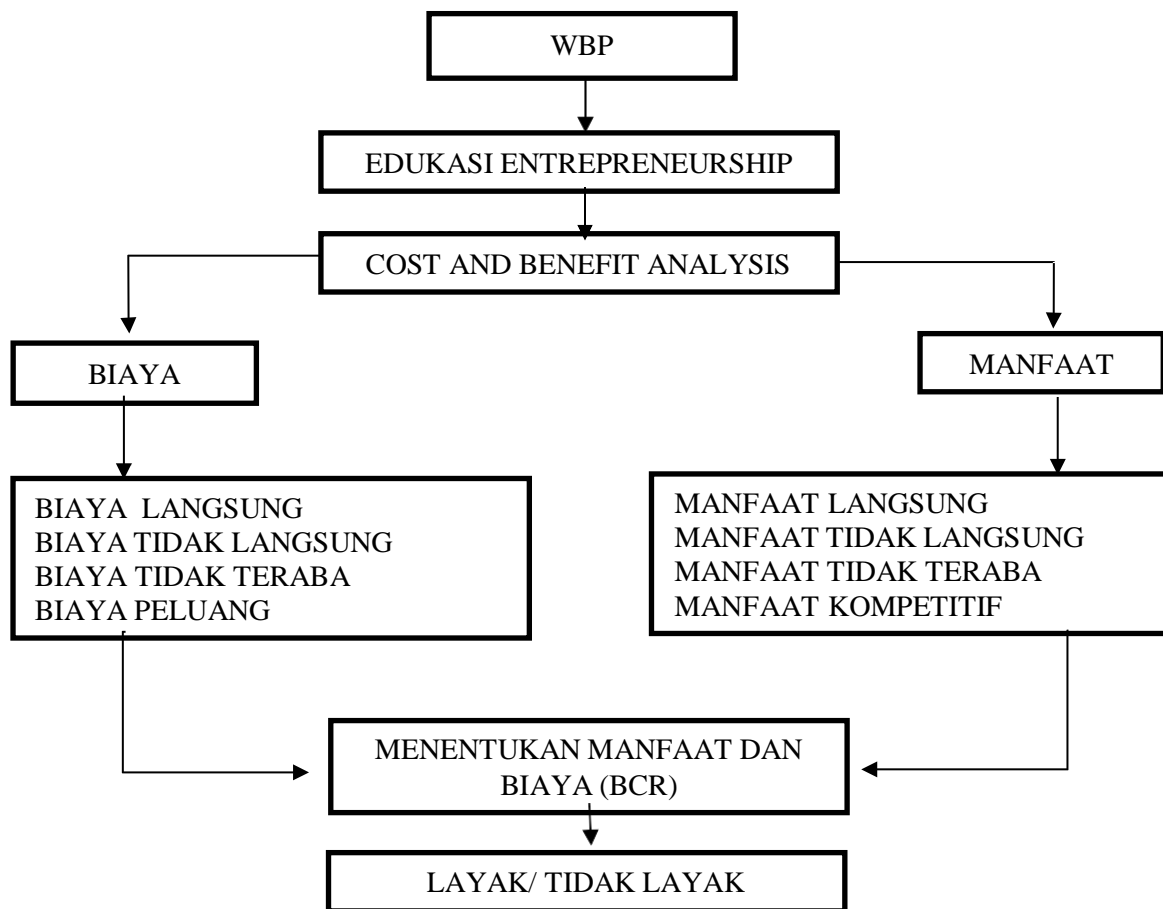
ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Frank Knight (1921) : Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahawan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan.

Pada saat ini Negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di Indonesia. Misalnya pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran, dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Banyak hal yang harus dibenahi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Padatnya penduduk di kota besar seperti Jakarta misalnya, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika hal ini belum dapat terselesaikan maka perkembangan perekonomian di Indonesia tidak akan mengalami peningkatan dan Indonesia tidak dapat menjadi negara maju. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan penduduk Indonesia harus ditingkatkan untuk membantu mengembangkan perekonomian negara Indonesia.

Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan.

Diantaranya dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya, masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan juga dapat menarik investor negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila kewirausahaan berjalan dengan baik. Jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukkan presentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal, untuk dapat dikatakan sebagai negara maju jumlah wirausaha di suatu Negara harus berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara- negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha lebih tinggi. Seperti Singapura yang merupakan negara dengan jumlah wirausaha tertinggi di ASEAN, kemudian Malaysia. Memprihatinkan memang, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan kurangnya inovasi dan kreativitas penduduk negara Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk dapat berwirausaha dibutuhkan kemauan dan niat yang kuat. Hal ini yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia.

Melalui teori yang relevan serta dukungan dari berbagai penelitian sejenis, secara garis besar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam skema berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar skema kerangka pemikiran diatas WBP yang berada didalam Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung diberikan Pelatihan Edukasi Entrepreneurship diantaranya yaitu pelatihan dibidang Tata Boga, dimana WBP tersebut akan diberikan pelatihan mulai dari membeli bahan produksi, mengolah bahan produksi hingga siap untuk dijual di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.

Dari pelatihan tersebut kita dapat menentukan nilai dari biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari Pelatihan Edukasi Entrepreneurship di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dan dihitung menggunakan rumus penghitungan Benefit Cost Ratio (BCR) dan dapat diketahui apakah Pelatihan Edukasi Entrepreneurship tersebut layak atau tidak layak untuk dilaksanakan untuk dikemudian hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer (menggunakan kuesioner kepada WBP yang mengikuti Pelatihan Edukasi Entrepreneurship dan petugas yang terlibat dalam kegiatan Edukasi Entrepreneurship). Data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh besar manfaat dan biaya yang diperlukan dalam pelatihan edukasi entrepreneurship kepada WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah Cost and Benefit Analysis untuk menganalisis data yang ada yaitu 5 WBP dan 3 Petugas yang terlibat dalam melakukan pelatihan edukasi entrepreneurship di bidang Tata Boga di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung pada kurun waktu tahun 2019-2020.

Dalam penggunaan metode analisis Cost and Benefit Analysis terdapat beberapa keuntungan diantaranya adalah :

- **Menggunakan data sebagai dasarnya**

Cost benefit analysis memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mengevaluasi keputusan secara obyektif dan tanpa bias.

Metode ini memberikan evaluasi agnostik dan berbasis bukti dari opsi-opsi yang dimiliki, membuat bisnis menjadilebih logis dalam beroperasi.

- **Menyederhanakan pengambilan keputusan**

Keputusan dalam bisnis biasanya memang rumit. Namun dengan membandingkan antara manfaat dan biaya, proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sederhana.

- **Mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi**

Analisis biaya manfaat memaksa anda untuk duduk dan menggaris bawahi setiap biaya dan manfaat yang berhubungan dengan sebuah proyek yang akan mengungkapkan adanya biaya dan keuntungan tersembunyi seperti biaya tidak langsung atau biaya tidak teraba.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri. Menurut Sugiyono (2011), variabel mandiri adalah variabel yang tidak dibandingkan atau dibandingkan dengan variabel lain. Variabel dalam penelitian ini adalah biaya-biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari edukasi entrepreneurship di bidang Tata Boga dalam proses asimilasi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung meliputi biaya langsung yang diperhitungkan diantaranya adalah biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian peralatan, biaya pembelian perlengkapan, biaya premi WBP yang bekerja dan biaya tidak langsung berupa biaya listrik, biaya air. Manfaat langsung yang diperhitungkan yaitu manfaat peningkatan pendapatan WBP dari perolehan premi penjualan serta peningkatan penjualan produk dari Tata Boga itu sendiri serta manfaat tidak langsung terdapat peningkatan minat konsumen dalam produk penjualan Tata Boga.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

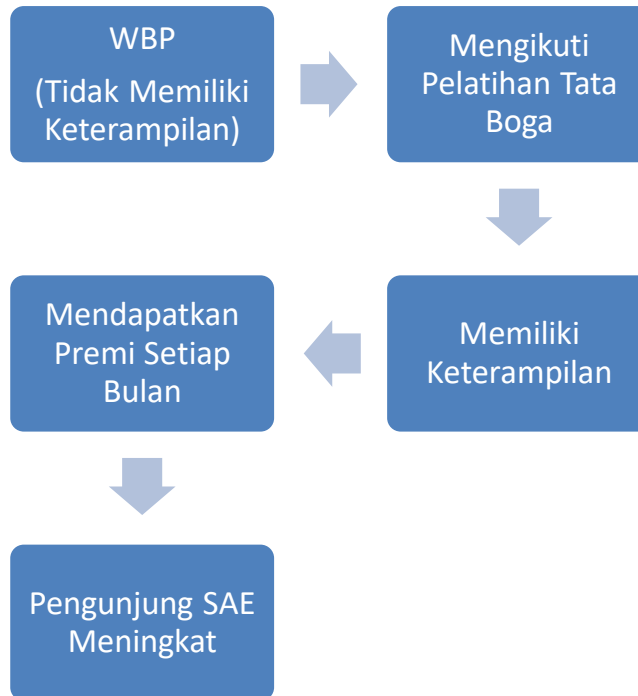
A. Manfaat Langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang ditimbulkan karena meningkatnya hasil atau produktifitas karena adanya dengan adanya proyek (Mangkusoebroto, 1994: 154).

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat langsung

dirasakan oleh WBP dari adanya pelatihan edukasi entrepreneurship di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung bidang Tata Boga.

Tabel 3.1 Manfaat Langsung Edukasi Entrepreneur Bidang Tata Boga



Dari tabel diatas dapat dilihat sebelum WBP mengikuti pelatihan Tata Boga di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung mereka tidak memiliki keterampilan dan penghasilan yang tetap, namun ketika mereka mengikuti pelatihan Tata Boga ini mereka mendapatkan keterampilan berupa mengelola bahan mentah menjadi makanan yang siap saji serta memiliki penghasilan atau premi yang tetap setiap bulannya dimana besaran premi tersebut tergantung dari besaran pendapatan bersih yang didapatkan setiap

bulannya. Selain dari itu juga manfaat langsung yang lain adalah meningkatnya jumlah pengunjung SAE dimana tempat pemasaran untuk hasil dari Tata Boga tersebut dan rata-rata pengunjung merupakan keluarga dari WBP yang ada di Lapis Perempuan Kelas IIA Bandung.

B. Manfaat Tidak langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang secara tidak langsung diakibatkan dengan adanya proyek (Mangkusoebroto, 1994: 154). Manfaat tidak langsung bisa sangat luas tergantung seberapa banyak faktor yang kita masukkan dalam analisis.

Tabel 3.2 Manfaat Tidak Langsung Edukasi Entrepreneur Bidang Tata Boga



Dari tabel diatas dapat kita lihat manfaat tidak langsung dihitung dari meningkatnya jumlah pengunjung SAE akan produk kuliner Tata Boga, hal ini dapat dilihat ketika banyak dari keluarga WBP yang membeli makanan dan minuman di SAE yang merupakan hasil dari pelatihan Tata Boga setelah melakukan penitipan barang kepada WBP, serta meningkatnya pesanan melalui aplikasi ojek online yang berarti minat masyarakat sekitar terhadap kuliner hasil pelatihan Tata Boga sangatlah tinggi dan berarti produk hasil dari WBP di bidang Tata Boga ini dapat bersaing dengan produk lain diluar sana.

C. Manfaat Tidak Teraba

Manfaat yang tidak teraba/ berwujud (*intangible benefit*) sulit untuk di ukur, dengan kata lain diartikan yaitu, keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam suatu nilai uang (Choliq et al, 1999).

Tabel 3.3 Manfaat Tidak Teraba Edukasi Entrepreneur Bidang Tata Boga

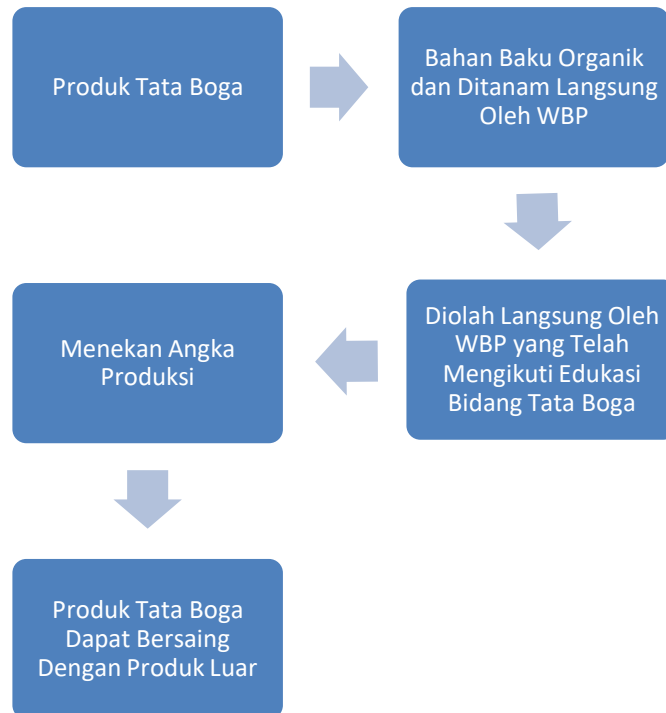


Dalam tabel diatas manfaat tidak teraba yang dirasakan adalah WBP memiliki sikap tanggung jawab yang semakin besar dalam mengelola makanan Tata Boga mulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas dan pengolahan tempat yang sangat mereka jaga kebersihannya serta meningkatnya semangat dalam mempromosikan kreasinya kepada para pengunjung di SAE dengan ramah.

D. Manfaat Kompetitif

Manfaat kompetitif adalah menjadi pioneer dalam industri atau usaha yang digeluti.

Tabel 3.4 Manfaat Kompetitif Edukasi Entrepreneur Bidang Tata Boga



Dalam data tabel diatas bidang Tata Boga selalu mempromosikan bahwa sebagian besar produkolahan yang dihasilkan merupakan bahan organik yang ditanam di area Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dan 100% hasil olahan WBP Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dimana memiliki harga jual yang dapat bersaing dengan harga makanan olahan organik diluar sana.

E. Biaya Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dikeluarkan saat adanya proyek atau biaya yang berkaitan langsung dengan adanya proyek. Biaya langsung dalam pelatihan edukasi entrepreneurship di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terdiri dari biaya bahan baku yang diperlukan untuk membuat berbagai macam menu kuliner, biaya pembelian peralatan dan perlengkapan, biaya untuk pembayaran premi kepada WBP yang mengikuti pelatihan edukasi entrepreneurship di bidang tata boga.

F. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung timbul karena adanya proyek. Biaya tidak langsung bisa memiliki cakupan yang luas tergantung sejauh mana kita akan menganalisis atau mengevaluasi dampak dari suatu proyek. Biaya tidak langsung dari adanya pelatihan edukasi entrepreneurship di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung meliputi biaya pembuatan SAE dan biaya promosi kuliner.

G. Biaya Tidak Teraba

Biaya tidak teraba merupakan biaya yang cukup sulit ditentukan. Contoh nyata dalam hal ini adalah pada tingkat jumlah konsumen dibidang Tata Boga yang ada pada SAE dibatasi karena adanya peraturan atau regulasi baru dari pemerintah dimana untuk makan ditempat (*Dine In*) dibatasi jumlahnya sehingga hal ini mempengaruhi konsumen yang ingin makan ditempat.

H. Biaya Peluang

Biaya peluang sendiri memiliki arti jumlah keuntungan yang didapatkan dari suatu strategi bisnis disbanding dengan strategi bisnis lainnya. Dalam hal ini Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung memiliki 2 alternatif, yang pertama adalah pendirian SAE serta Pelatihan Edukasi Entrepreneurship di Bidang Tata Boga dan pelatihan desain grafis, namun Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung lebih memprioritaskan pembangunan SAE serta Pelatihan Edukasi Entrepreneur di Bidang Tata Boga Karena di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung lebih dominan untuk bidang Tata Boga.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas yang terlibat dan seluruh WBP yang mengikuti pelatihan edukasi entrepreneurship di pos kerja Tata Boga sebanyak 5 orang pada tahun 2019-2020 di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam Penelitian ini berjumlah sebanyak 8 orang. Jumlah sampel ini diambil dari 3 orang petugas yang terlibat dan 5 orang WBP dari pos kerja Tata Boga yang mengikuti pelatihan edukasi entrepreneurship di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Dalam pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling yaitu Simple Random Sampling.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi

3.4.1 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendetail biaya dan manfaat yang ditimbulkan dari edukasi entrepreneurship dalam proses asimilasi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung terhadap pihak-pihak terkait.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui jumlah kunjungan SAE di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung tahun 2019-2020.

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam teknik analisis Biaya-Manfaat ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek. Penelitian ini ingin mengetahui nilai biaya manfaat dari pelatihan edukasi entrepreneurship di pos kerja Tata Boga dalam proses asimilasi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Benefit Cost Ratio (BCR).

3.5.1 Benefit Cost Ratio (BCR)

Metode **Benefit Cost Ratio (BCR)** dilakukan dengan cara membandingkan semua manfaat yang telah diidentifikasi selama umur investasi yang direncanakan dengan total biaya yang dikeluarkan selama proyek dilaksanakan. Yang kesemuanya dinyatakan dalam tahun ke-0 (Present).

Benefit Cost Rasio (BCR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$BCR = \frac{\sum B_t / (1 + i)^t}{\sum C_t / (1 + i)^t}$$

Dimana:

BCR = Benefit Cost Ratio

$\sum B_t$ = Jumlah Benefit/Manfaat

$\sum C_t$ = Jumlah Cost/ Biaya

Dari perhitungan BCR akan diperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Jika **BCR** > 1 diartikan proyek dalam hal ini Edukasi Entrepreneurship layak untuk dijalankan.
- b. Jika **BCR** < 1 diartikan proyek dalam hal ini Edukasi Entrepreneurship tidak layak dijalankan.

3.6 Rancangan Kuesioner

Kuesioner disebut juga sebagai angket atau *self administrated questioner* adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara mengirimkansıtu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Penyusunan pertanyaannya dengan cara pertanyaan terbuka, adalah suatu kuesioner dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden memiliki jawaban yang bebas namun tetap mengarah kepada permasalahan yang ada.